Tantangan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia

DR. Sri Adiningsih

1. Latar Belakang

Lingkungan hidup tidak mendapatkan banyak perhatian untuk waktu yang lama sehingga degadrasi lingkungan telah banyak merusak kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat dunia sejak tahun 1970an mulai memberikan perhatian yang besar pada masalah lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat diantaranya dari Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), dan Johannesburg Declaration (2002). Meski komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih saja memburuk. Kita sekarang masih hidup dalam kondisi pembangunan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itulah usaha untuk menjaga lingkungan hidup agar pembangunan dapat berkelanjutan menjadi semakin penting untuk diperjuangkan guna menjamin agar supaya dalam memenuhi kebutuhan sekarang tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial, yang dikenal dengan *the living triangle*. Tidaklah mungkin lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Oleh karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan.

Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada pembangunan berkelanjutan, khususnya dari negera maju adalah cukup besar. Namun demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari harapan. Dapat dilihat dari *Official Development Assistance* (ODA) yang diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapati hanya 4 negara yang menandatangi komitmen ODA memenuhi komitmennya. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat globalpun seringkali hanya

menjadi retorika politik belaka. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan.

2. Potret Domestik

Komitmen pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan potret internasional. Komitmen pemerintah cukup besar sejak jaman Orde Baru, diantaranya dapat dilihat dengan keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup yang tentunya diikuti dengan kebijakan dan anggaran untuk melestarikan lingkungan hidup yang memadai. Namun demikian kerusakkan lingkungan hidup Indonesia masih saja berlanjut. Laut, hutan dan lingkungan hidup lainnya pada umumnya semakin rusak. Apa yang salah?

Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa menjaga lingkungan hidup tidaklah dapat berdiri sendiri. Pembangunan berkelanjutan dengan melestarikan lingkungan hidup hanya akan berhasil jika dipadukan secara terintegral dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itulah mendesain *masterplan* yang terintegral dalam pembangunan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial akan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Meski demikian desain program yang baikpun belum menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan seringkali terganjal oleh kurangnya implementasi yang baik. Secara prinsip pembangunan berkelanjutan sebenarnya harus terefleksi dalam cara berfikir, hidup, memerintah dan berbisnis. Oleh karena itulah dalam kerangka mensukseskan pembangunan berkelanjutan banyak sekali aspek yang perlu dibenahi.

Kegagalan implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan berkelanjutan seringkali karena tidak mempertimbangkan berbagai asepek yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya (Cooper, Phillip J. Dan Vargas, Claudia M., Implementing Sustainable Development from Global Policy to Local Action, Rowman & Littlefield Publisher Inc., UK, 2004). Dimana semua sisi tersebut perlu diperhatikan agar supaya implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dijalankan dengan baik. Pertanyaan apakah secara teknis suatu kebijakan fisibel erat kaitannya dengan apakah kita tahu apa yang perlu dilakukan, bagaimana caranya? Seringkali tantangannya disini adalah lebih pada masalah

keberlanjutannya suatu kebijakan dan apa yang dilakukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari sisi legal tentu saja erat kaitannya dengan apakah secara legal kebijakan ataupun program yang dilakukan tidak melanggar rambu-rambu yang ada. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita mendesain infrastruktur legal yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi diantaranya adalah bagaimana mendesain kebijakan yang ongkosnya minimal. Selain itu masalah pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan biasanya juga terbatas. Oleh karena itu perlu terobosan agar supaya secara fiskal baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Reformasi fiskal yang tengah kita gulirkan mestinya juga didasari oleh kepentingan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Adapun aspek administrasi erat kaitannya dengan kemampuan organisasi dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan secara konsisten kebijakan yang ada. Dalam hal ini koordinasi baik secara horizontal ataupun vertikal sangat krusial untuk dilakukan. Seringkali ego antar instansi dan juga antar pemerintah pusat dan daerah membuat koordinasi untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sulit untuk dilakukan. Aspek politik juga memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Selain *political will* untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan penting. Namun stabilitas politik juga memegang peranan penting dalam hal ini. Untuk itulah perlu pembangunan institusi dan juga perbaikkan pemerintahan diperlukan untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan aspek etika dan budaya juga memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Itu semua menunjukkan bahwa mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah. Meski demikian tidak berarti tidak dapat dilakukan.

Kesimpulan

Semakin rusaknya lingkungan hidup membuat usaha melestarikan lingkungan hidup harus dilakukan di Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah mulai kita lakukan lagi. Namun demikian menjaga lingkungan hidup tidak akan berhasil jika aspek ekonomi dan sosial diabaikan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral baik dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial agar supaya lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup kita. Namun demikian kebijakan dengan program yang

bagus pun tidaklah dapat menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah impelementasi dari kebijakan yang diambil. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu *environment* agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun program tersebut mesti mempertimbangkan baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah diimplementasikan.

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bersumber dari sumber dana pemerintah yang terbatas. APBN Indonesia yang berat untuk beban pembayaran hutang dan subsidi membuat kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi pembangunan semakin terbatas. Apalagi adanya Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara ataupun berbagai bencana alam akhir-akhir ini akan menyedot sumber daya yang kita miliki. Namun demikian, tentu saja upaya untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan harus tetap dilaksanakan. Dukungan sumber daya dari berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri sangat diperlukan.